MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU
Jalan Prof Moh Yamin No 52, Birobuli Utara, Kec.Palu Selatan, Kota Palu
Sulawesi Tengah 94111

REGISTER PERMOHONAN INFORMASI

Bulan Juli s.d. Bulan September Tahun 2026

No.	Nomor Pendaftaran	Tanggal Permohonan	Identitas Pemohon	Rincian Informasi yang Dimohonkan	Tujuan Penggunaan Informasi	Tanggal Pemberian Informasi	Keterangan
1.	9/PPID/PTUN.PL/VII/2026	09/07/2026	Ariatno	Salinan putusan perkara 74/G/2023 PTUN.PL	Dengan tujuan dalam rangka Penyusunan Skripsi yang berjudul : Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Palu No. 74/G/2023 PTUN.PL Tentang Pembatalan Pengangkatan Perangkat Desa	09/07/2026	-

2.	10/PPID/PTUN.PL/VII/2026	17/07/2026	Andi Iskandar	Surat Keterangan BHT perkara nomor 94/G/TF/2022/PTUN.PL	Untuk pengurusan tidak lanjut/ pelaksanaan putusan	17/07/2026	-
3.	11/PPID/PTUN.PL/VIII/2026	20/08/2026	Agustinus Hariadi, ST	Surat Keterangan BHT Perkara Nomor 373/K/TUN/2026 tertanggal 25 Juni 2026 Jo. 10/B/2026/PT.TUN.MKS tertanggal 25 Februari 2026 Jo. 10/G/2025/PTUN.PL tertanggal 27 November 2025	-	20/08/2026	-
4.	12/PPID/PTUN.PL/VIII/2026	27/08/2026	Wang Zhongbang	Permohonan Informasi Salinan Putusan Perkara No. 88/G/TF/2023/PTUN.PL Tertanggal 16 November Tahun 2023	Proses Uji Tuntas (Due Diligence) dalam rangka aksi korporasi	27/08/2026	-
5.	13/PPID/PTUN.PL/IX/2026	02/09/2026	Richard Markus S.H.C.Med	Salinan Gugatan Perkara Nomor 24/G/TF-LH/2026/PTUN.PL	Untuk mengajukan upaya hukum intervensi	-	Bahwa salinan gugatan termasuk informasi yang dikecualikan dan hanya diperuntukkan bagi Majelis Hakim dan para pihak

6.	14/PPID/PTUN.PL/IX/2026	24/09/2026	IR. Idul Ail	Salinan Putusan Perkara Nomor 88/G/TF/2023/PTUN.PL	Untuk pengurusan perizinan di Propinsi atas nama Direktur PT. Lampion Alaskah sebagai salah satu persyaratan pengurusan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	24/09/2026	-
7.	15/PPID/PTUN.PL/IX/2026	28/09/2026	I Ketut Yoga Widata, S.H.	1. Bagaimana pandangan PTUN terhadap pentingnya ketepatan waktu penerbitan keputusan PTDH setelah adanya putusan KKEP? 2. Bagaimana kedudukan keputusan PTDH dalam perspektif hukum administrasi pemerintah? 3. Apa konsekuensi hukum apabila keputusan PTDH terlambat diterbitkan setelah adanya putusan KKEP? 4. Faktor apa saja yang dapat menyebabkan keputusan PTDH berpotensi disengketakan di PTUN? 5. Bagaimana pentingnya kesesuaian antara putusan KKEP dengan keputusan PTDH yang diterbitkan? 6. Bagaimana pengaruh kelengkapan prosedur dan administrasi terhadap keabsahan keputusan PTDH? 7. Bagaimana seharusnya instansi memastikan bahwa keputusan PTDH memenuhi asas kepastian hukum? 8. Dalam perkara PTDH, aspek administrasi apa yang paling sering menjadi perhatian dalam pemeriksaan sengketa? 9. Bagaimana upaya preventif yang dapat dilakukan untuk mengurangi potensi sengketa PTUN akibat proses penerbitan keputusan PTDH? 10. Apa rekomendasi dari perspektif PTUN untuk meningkatkan kepastian hukum dalam penerbitan keputusan PTDH? Menjawa di link Google Form berikut: https://forms.gle/t5as5zLAV8YUhH418	Untuk penyusunan penelitian	05/10/2026	-